BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat memegang teguh prinsip hak asasi manusia (HAM). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang mengatur pelanggaran terhadap HAM. Salah-satunya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak asasi manusia adalah hak yang tak dapat diganggu gugat dan sudah melekat pada setiap individu.

Adanya perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokrasi.¹ Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan, dihormati dan disebarakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun telah terdapat peraturan hukum yang sangat rinci yang mengatur hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dan diskriminatif yang merugikan hak asasi manusia semakin sering muncul dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Tindakan yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh pihak yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta*, 2006, hlm. 245.

berhubungan dengan negara (*state actor*), yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh individu atau masyarakat (*non-state actor*), yaitu pelanggaran yang terjadi antara antar sesama masyarakat itu sendiri (pelanggaran HAM horizontal).

Mengenai keragaman istilah yang digunakan dalam konteks hak asasi manusia, Mien Rukmini mengatakan bahwa, “Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap”. Pernyataan yang dikemukakan oleh Mien Rukmini adalah benar, karena persoalan dalam hak asasi manusia sebenarnya bukan terletak pada istilah atau bahasa yang digunakan, tetapi mengikuti pendapat Bagir Manan, bahwa persoalan dalam hak asasi manusia bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Seiring dengan munculnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, munculah keinginan bagaimana menjaga dan melindungi hak asasi manusia tersebut.²

Sejak berdirinya negara ini, pembahasan mengenai hak asasi manusia bukanlah hal yang asing dalam ranah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Indonesia termasuk negara yang mengakui, menjamin serta menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertera dalam Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.

² Marojahan JS Panjaitan, *"Politik Hak Asasi Manusiadan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945"*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 2018, hlm. 24-25.

Pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan hak dan kewajiban dasar setiap manusia.³ Hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap manusia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain:⁴

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk kebebasan pribadi;
- c) Hak untuk berkeluarga;
- d) Hak untuk memperoleh rasa keadilan;
- e) Hak untuk mengembangkan diri;
- f) Hak atas kesejahteraan;
- g) Hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan;
- h) Hak perempuan;
- i) Hak anak; dan
- j) Hak atas rasa aman.

Sedangkan yang termasuk ke dalam kewajiban dasar setiap manusia, yaitu:⁵

- a) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Setiap individu manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, etika, moral dan tata tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai Komnas HAM) pada 7 Juni 1993 menjadi sangat penting sebagai sebuah lembaga independen dalam menegakkan hak asasi manusia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak manusia semua individu dihormati dan dilindungi sepenuhnya. Komnas HAM adalah lembaga independen negara yang bersifat mandiri dan berkedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya.⁶

³ Akmal, "*Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktik*", UNP Press Padang, Padang, 2015, hlm.

4

⁴ Artidjo Alkostar, "*Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*", Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 325-326.

⁵ Dasril Radjab, "*Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*", PT Rineka Ciptra, Jakarta, 2005, hlm. 182.

⁶ Dasril Radjab, *Lok Cit*, hlm. 185.

Komnas HAM memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan dan mediasi tentang hak asasi manusia terutama di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diakui sebagai lembaga independen yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Fungsi utama Komnas HAM adalah untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi terkait dengan hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM juga dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi ini, jika dilihat dari perspektif teori pemisahan kekuasaan klasik, tidak terlihat dengan jelas Komnas HAM berada dalam lembaga apa. Namun, apabila dipandang dari perspektif fungsi yang telah diatur dalam undang-undang, maka Komnas HAM melaksanakan peran yang khusus dalam bidang hak asasi manusia. Oleh karena itu, Komnas HAM menjalankan fungsi yang serupa dengan cabang eksekutif dalam hal penegakan dan promosi hak asasi manusia, dengan kewenangan tersebut diatur oleh undang-undang.⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membawa banyak perubahan terhadap lembaga Komnas HAM jika dibandingkan dengan peraturan yang berlaku sebelumnya. Meskipun begitu, regulasi ini masih dianggap kurang memadai dalam memperkuat kedudukan sebuah lembaga mandiri yang benar-benar independen. Hingga sekarang, status

⁷ Sri Hastuti Puspitasari, "Komnas HAM Indonesia Kedudukan Dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum* 9, no. 21 (2002), hlm. 107,

keberadaan lembaga ini masih dianggap relatif lemah, yang berdampak pada kinerja Komnas HAM yang tidak dapat mencapai potensi sepenuhnya.

Salah satunya alasan mengapa lembaga ini masih dianggap relatif lemah menurut seorang aktivis Perhimpunan Badan Hukum Indonesia bernama Totok Yulianto, mengutarakan:

Aturan mengenai institusi lembaga ini masih belum begitu jelas, karena di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak terdapat ketentuan mengenai fungsi strategis dari Komnas HAM, sehingga hal ini dapat menyebabkan berbagai penafsiran yang berbeda terkait dengan lembaga tersebut. Dan juga, disebutkan dalam Pasal 98 UU HAMdana untuk operasional Komnas HAM masih bergantung pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Totok menganggap bahwa hal ini dapat menghambat kemampuan Komnas HAM untuk beroperasi dengan fleksibel, dinamis dan responsif secara optimal.⁸

Banyaknya kelemahan ini sebenarnya juga disebabkan oleh ketidaksempurnaan integrasi antara kedudukan, fungsi, wewenang dan dasar hukum Komnas HAM. Sebagai contoh, fungsi dan wewenang Komnas HAM tersebar dalam tiga undang-undang yang berbeda. Pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur fungsi seperti penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauandan mediasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur peran sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat. Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur peran sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. Pembagian fungsi dan kewenangan dalam lembaga Komnas HAM belum

⁸ Kompas.com, “*Apa Penyebab Tak Maksimalnya Kinerja Komnas HAM,*” 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/16/22372671/apa-penyebab-tak-maksimalnya-kinerja-komnas-ham->.

sepenuhnya terintegrasi dengan baik.⁹

Pembahasan mengenai hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang mendasarinya. Asas-asas hak asasi manusia pada dasarnya juga termuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsadan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Asas-asas hak asasi manusia menjadi jelas saat kita berbicara tentang definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu sebagai hak-hak yang bersifat mutlak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini membuktikan bahwa hak-hak tersebut adalah hak dasar yang melekat secara mutlak pada diri setiap individu dan tidak dapat dicabut maupun dilanggar oleh siapapun.

Hak asasi manusia merupakan sebagai hak dasar yang ada sejak lahir, maka setiap individu manusia memiliki hak yang sama, kesetaraan dan tingkat keadilan yang setara.¹⁰ Asas- asas dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁹ Rommy Patra, "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, No. 2, 2012, hlm. 211,

¹⁰ Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., "Hukum Hak Asasi Manusia", Yogyakarta: ANDI, Edisi Kesatu, 2017, hlm 62.

- a) Asas Kemelekatan
Asas kemelekatan adalah asas dasar yang menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, sehingga tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan diabaikan (*indoregable*) oleh siapa pun.
- b) Asas Kesederajatan/Kesetaraan
Asas kesederajatan/kesetaraan adalah asas dasar yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia dan oleh karena itu, setiap individu manusia memiliki kedudukan yang setara atau setara dengan individu manusia lainnya.
- c) Asas Non-Diskriminasi
Asas non-diskriminasi adalah asas dasar yang menegaskan bahwa setiap manusia, sebagai hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya diperlakukan setara tanpa memandang faktor-faktor seperti agama, warna kulit, bahasa, suku bangsadan lain sebagainya.
- d) Asas Universal
Asas universal adalah asas dasar yang menegaskan bahwa hak asasi manusia melekat pada sifat dan keberadaan setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esadan merupakan anugerah-Nya, tanpa memandang perbedaan apapun.
- e) Asas Eternal
Asas eternal adalah asas dasar yang menegaskan bahwa hak asasi manusia memiliki eksistensi yang tidak terputus, bersifat berkelanjutan dan abadi, tetap ada seiring dengan keberadaan manusia.
- f) Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan dan Tidak Berbagi
Asas saling keterhubungan, ketergantungan dan tidak berbagi adalah asas dasar yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia saling terhubung, ketergantungan taak terbagi antara satu individu dengan yang lain.¹¹

Dari beberapa penjelasan tersebut, terlihat bahwa Komnas HAM memiliki banyak peran yang tersebar di berbagai Undang-Undang di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, lembaga ini tampaknya tidak memiliki desain kelembagaan yang komprehensif dan terpadu. Peran yang diberikan kepada Komnas HAM terlihat seperti upaya yang dilakukan secara parsial dan tidak selaras dengan

¹¹ Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H, *Ibid*, hlm. 63-67.

kewenangan yang harusnya secara sistematis melekat pada lembaga tersebut sehubungan dengan tujuan yang diberikan kepadanya.

Kekosongan undang-undang khusus terhadap Komnas HAM membuatnya sulit untuk beroperasi secara independen dan fleksibel. Keberadaan Komnas HAM tidak hanya diatur oleh undang-undang yang khusus untuknya, tetapi juga tidak diatur secara langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri terdapat pengaturan mengenai norma-norma hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang peran Komnas HAM dalam mengawasi dan memastikan asas-asas dasar hak asasi manusia berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu skripsi hukum yang berjudul: **“PERAN KOMNAS HAM DALAM MENGAWASI DAN MEMASTIKAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KEPRES NOMOR 50 TAHUN 1993”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan lembaga Komnas HAM sebagai alat bantu negara bersifat independen di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Dalam Mengawasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Diatur Dalam Kepres Nomor 50 Tahun 1993 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga Komnas HAM sebagai alat bantu negara bersifat independen di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dalam mengawasi pelaksanaan asas-asas dasar hak asasi manusia yang diatur dalam Kepres Nomor 50 Tahun 1993 di Indonesia, serta sejauh mana efektivitas mereka dalam menjalankan peran tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dapat bermanfaat dalam menambah wawasan berkenaan dengan peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam mengawasi dan memastikan asas-asas dasar Hak Asasi Manusia sesuai dengan Kepres Nomor 50 Tahun 1993.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dapat bermanfaat bagi pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk lebih mengawasi dan memastikan asas-asas dasar hak asasi manusia sesuai dengan Kepres Nomor 50 Tahun 1993.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap judul skripsi yang masih bersifat abstrak. Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami skripsi ini, penulis memberikan

definisi untuk masing-masing kata yang ada pada judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan proses dinamika kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹² Sedangkan menurut Merton, “peran merupakan sebuah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.”

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, “Sebuah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian dan penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia”.

3. Asas-Asas Dasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas-asas dasar yaitu prinsip dasar yang menjadi sebuah acuan dalam berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting.

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esadan

¹² Yare Mince, “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor” 3, no. 2 (2021): hlm. 20.

merupakan anugerah yang harus dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, oleh sesama manusia. Hak asasi manusia merupakan dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut.¹³

5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 adalah Keputusan Presiden yang didalamnya mengatur tentang Komnas HAM.

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ini yang berdasarkan pada kerangka konseptual di atas, penulis mengambil teori yang sesuai untuk menjelaskan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut yaitu:

1. Teori Lembaga Negara Independen

Lembaga negara independen yang juga berperan sebagai lembaga negara pembantu, bisa berasal dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang sudah ada atau dapat dibentuk secara independen tanpa terkait langsung dengan fungsi kekuasaan negara tersebut. Lembaga negara independen yang berfungsi mengadili (*quasi* peradilan) telah mendapatkan legalitas melalui konstitusi melalui pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan ruang untuk

¹³ Detik.com, “*Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli*,” 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli#>:

pembentukan badan atau lembaga baru yang memiliki fungsi *quasi* peradilan, selama diatur undang-undang.¹⁴

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia berasal dari keyakinan pada prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi seluruh umat manusia¹⁵. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu, karena hak-hak ini merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh semua orang dan harus dipenuhi oleh negara dan lembaga lainnya.

Prinsip kesetaraan adalah memberikan jaminan perlindungan dan pemberian kesempatan yang adil bagi semua individu untuk memastikan hak-hak pribadi mereka tanpa adanya diskriminasi. Kesetaraan menekankan pentingnya memberikan akses, peluang dan perlakuan yang sama kepada setiap orang, termasuk kelompok-kelompok yang rentan.

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Darul Akbar
	Judul	Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁴ Eki Furqon, “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Ilmu Vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 84

¹⁵ Rhona K.M. Smith Smith et al., “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia”, Yogyakarta, 2008, hlm. 19.

	Tahun	2022
	Permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kedudukan komisi nasional hak asasi manusia menurut tugas, fungsi dan wewenangnya di dalam peraturan perundang-undangan
	Kesimpulan	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga negara mandiri atau independen yang berstatus sebagai lembaga bantu (<i>State Auxiliary</i>) dan memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki beberapa fungsi di beberapa peraturan perundang-undangan seperti fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan pemantauan dan fungsi mediasi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kemudian fungsi penyelidikan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan fungsi pengawasan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

2.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Ilma Indah Anggraini
	Judul	Peran Komnas Ham Dalam Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Perpres No. 65 Tahun 2005 Tentang Komnas Perempuan Dan Fiqh Siyasah Syar'iyah
	Tahun	2023
	Permasalahan	Untuk mengetahui bagaimana peran Komnas HAM dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan menurut <i>fiqh siyasah syar'iyah</i>
	Kesimpulan	Peran Komnas HAM dalam <i>fiqh siyasah syar'iyah</i> secara preventif menurut fiqh siyasah merupakan satu penerapan prinsip pendidikan, prinsip pengawasandan prinsip perlindungan. Dalam penerapan menurut fiqh siyasah dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, pembentukan <i>qadhi</i> atau <i>wazir tafwidi</i> serta menegakan hukum jinayat
3.	Jenis Karya Tulis	Tesis
	Nama Penulis	Huda Habibiellah

	Judul	Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Di Wamena Tahun 2019)
	Tahun	2022
	Permasalahan	Apa saja bentuk-bentuk hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019 dan bagaimana peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019
	Kesimpulan	Bentuk-bentuk hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019 yaitu hak atas hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), hak atas kepemilikan (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dan hak atas rasa aman

	(sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
--	---

H. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna dapat terlaksana dan tercapainya penelitian ini, maka penulis menggunakan metode berikut untuk penelitian ini, yaitu:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan peran Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

2. Pendekatan Hukum

a. Pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan ini melibatkan analisis peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan peran Lembaga Komnas HAM. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan pendekatan ini sebagai pendekatan legislasi dan

¹⁶ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 97.

regulasi.¹⁷ Tujuannya untuk mengkaji semua undang-undang dan aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang diselidiki, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks hukum yang relevan.

b. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual adalah metode yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum untuk mengidentifikasi ide-ide yang membentuk pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas dan kekuatan hukum yang tetap. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Pranadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.137.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang mencakup kamus, ensiklopedia, dan buku non-hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi terhadap asas-asas dasar dengan peran Komnas HAM berdasarkan hukum yang ada.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci terhadap pembahasan skripsi ini, maka penting untuk menyusunnya secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi kajian tentang Lembaga Komnas HAM dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang nantinya dapat menjadi landasan untuk bab yang dibahas selanjutnya.

BAB III Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah, bab ini merupakan pembahasan mengenai Peran Komnas HAM dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan asas-asas dasar hak asasi manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.